



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
TAHUN 2024
KECAMATAN TRENGGALEK**

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KATA PENGANTAR



tas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Trenggalek dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini suatu niat dan tekad yang baik dari Kecamatan Trenggalek sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara utuh dan berkelanjutan.

Dari capaian yang telah dicapai saat ini, kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, maka kami instruksikan kepada semua komponen dalam jajaran Pemerintah Kecamatan Trenggalek agar lebih memahami dan melaksanakan SAKIP dengan baik serta memberikan sumbangsuhnya baik tenaga, pikiran dan sebagainya sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam pencapaian target kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, semoga hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan pada masa yang akan datang.

Trenggalek, Februari 2025



IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Trenggalek selama tahun 2024. Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan acuan yang dipergunakan adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2024 dengan membandingkan target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori "**TINGGI**", dengan rata-rata persentase capaian sebesar 99,18 %.

Dari segi akuntabilitas keuangan, secara umum pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Trenggalek Tahun 2024 termasuk memuaskan

dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 97,09%. Dari total anggaran Tahun 2024 sejumlah Rp.9.408.699.898,00 dimana anggaran yang dapat direalisasikan sejumlah Rp.9.134.609.820,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 102 (seratus dua) Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diketahui bahwa semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100%, Hal tersebut dapat di sajikan dalam tabel, berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	87,43 (A)	103,47
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99	99,81	100,81

Meskipun secara umum telah menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan yang akan datang. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kinerja pada Pemerintah Kecamatan Trenggalek di masa yang akan datang.

Trenggalek , Januari 2025

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Trenggalek.....	8
1.3 Isu – Isu Strategis.....	22
1.4 Landasan Hukum	23
1.5 Sistematika Pelaporan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Trenggalek 2021-2016.....	26
2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trenggalek Tahun 2024 ...	42
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	43
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2024	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	55
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	58
3.4 Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP.....	80

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2024

DAFTAR TABEL

1.1 :	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Trenggalek Tahun 2024.....	12
1.2 :	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK Kecamatan Trenggalek Tahun 2024	13
1.3 :	Daftar Pegawai Kecamatan Trenggalek Tahun 2024.....	14
1.4 :	Barang yang Dikelola Kecamatan Trenggalek.....	16
1.5 :	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Trenggalek...	22
2.1 :	Matrik Perencanaan Kinerja Kecamatan Trenggalek.....	31
2.2 :	Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
2.3 :	Perjanjian Kinerja 2024.....	44
2.4 :	Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan	44
2.5 :	Perbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami Perubahan antar Sebelum dan Sesudah Perubahan	45
2.6 :	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	46
3.1 :	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	56
3.2 :	Analisis Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	58
3.2.1:	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024	59
3.2.2:	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024	61
3.4 :	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Trenggalek Tahun 2024.....	62
3.5 :	Realisasi Anggaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2024.....	66
3.6 :	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.....	75
3.7 :	Perbandingan dan Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2024.....	78

DAFTAR GAMBAR

1.1 :	Peta Administrasi Kecamatan Trenggalek.....	10
1.2 :	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	21
1.3 :	Bagan Struktur Organisasi Kelurahan	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Trenggalek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Trenggalek mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Trenggalek Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

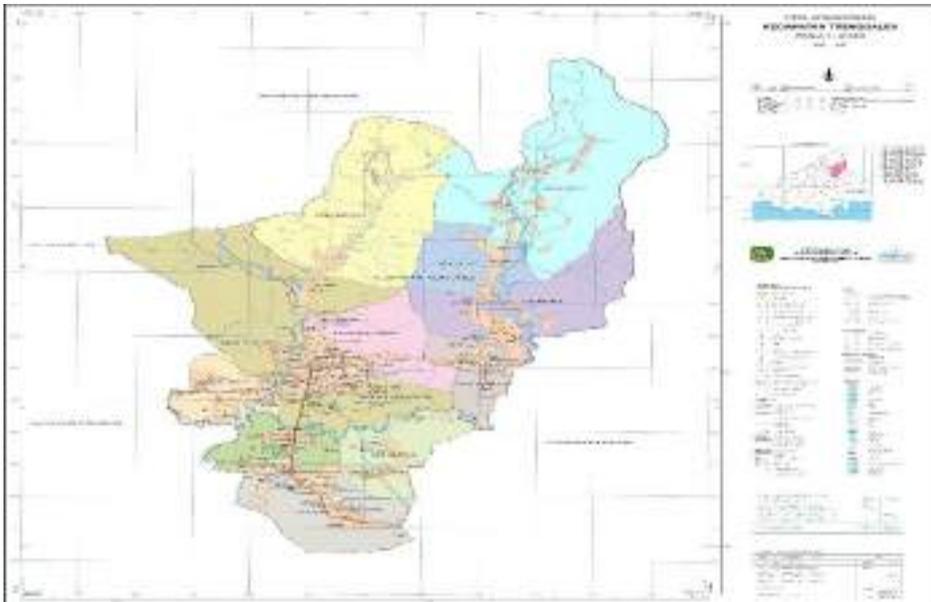
Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Trenggalek dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Trenggalek.

1.2. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan merupakan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan serta Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Kepala Perangkat Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Trenggalek berada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek. Secara Geografis Kecamatan Trenggalek terletak pada 111°28 – 112°06 Bujur Timur dan 07°56 – 08°31 Lintang Selatandengan ketinggian 105 dpl dari permukaan laut. Kecamatan Trenggalek terletak di pusat Kota Trenggalek, dan 186 km dari Ibu kota provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 6.107 Ha dimana hampir 66,6% dari luas wilayah Kecamatan Trenggalek merupakan wilayah daratan dan sisanya pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Bendungan
2. Sebelah timur : Kecamatan Pogalan
3. Sebelah barat : Kecamatan Karanggenan dan Kecamatan Gandusari
4. Sebelah selatan : Kecamatan Karanggenan

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Trenggalek



Wilayah Kecamatan Trenggalek terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan dan 8 (delapan) desa, yaitu:

A. Kelurahan

- 1) Kelurahan Surodakan
- 2) Kelurahan Sumbergedong
- 3) Kelurahan Ngantru
- 4) Kelurahan Tamanan, dan
- 5) Kelurahan Kelutan.

B. Desa

- 1) Desa Karangsoke
- 2) Desa Sambirejo
- 3) Desa Ngares
- 4) Desa Sumberdadi
- 5) Desa Rejowinangun
- 6) Desa Parakan
- 7) Desa Sukosari, dan
- 8) Desa Dawuhan.

Di Kecamatan Trenggalek, masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang sangat beragam seperti pegawai perkantoran baik pemerintah maupun swasta, bidang perdagangan dan industri karena letaknya di pusat kota dan pusat pemerintahan. Selain itu kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Trenggalek antara lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan, transportasi dan jasa lainnya (retail, waralaba dsb).

Kecamatan Trenggalek sebagai salah satu Perangkat Daerah di kabupaten Trenggalek dalam menjalankan organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Trenggalek termasuk Kecamatan dengan beban kerja kecil, sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, sekretaris Kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi, lurah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Kecamatan Trenggalek mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 37 tahun 2017, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 36 orang (data sumber per Desember Tahun 2024) yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Kecamatan Trenggalek sejumlah 36 orang termasuk yang ada di Kelurahan, dengan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
Menurut Golongan			
1	Golongan I	0	Orang
2	Golongan II	13	Orang
3	Golongan III	21	Orang
4	Golongan IV	3	Orang
	Jumlah Total	36	Orang
Menurut Pendidikan			
1	Pasca Sarjana	1	Orang
2	Sarjana	16	Orang
3	Diploma (D-III)	0	Orang

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
4	Diploma (D-IV)	1	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	13	Orang
6	SLTP/SMP	0	Orang
7	SD		Orang
	Jumlah Total	36	Orang
Menurut Jenis Kediklatan			
1	Struktural	4	Orang
2	Fungsional	0	Orang
3	Teknis	32	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	0	Orang
	Jumlah Total	36	Orang
Menurut Jenis Kelamin			
1	Laki - Laki	24	Orang
2	Perempuan	12	Orang
	Jumlah Total	36	Orang

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2024

Komposisi pegawai Kantor Kecamatan Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki –laki sebanyak 24 orang, dan perempuan sebanyak 12 orang, sedangkan untuk PPPK sampai dengan saat ini masih belum ada.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kantor Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	24 Orang	12 Orang	36 Orang
2	PPPK	0	0	0

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2024

Tabel 1.3
Daftar Pegawai PNS dan PPPK pada Kantor Kecamatan Trenggalek
Tahun 2024

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
1	Drs. Kiki Wahyu Rezeki	IV/b	Camat	S1
2	Iwan Sigit Badawi,S.Pt	IV/a	Sekretaris Kecamatan	S1
3	Sholeh Wahyuni, S.Sos	III/b	Kasi Kesejahteraan Rakyat	S1
4	Mursidi, S.Sos	III/d	Kasi Tata Pemerintahan	S1
5	Agus Widodo, ST	III/d	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	S1
6	Dwi Utami Astuti, SE	III/d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1
7	Sri Wahyuni	III/a	Pengelola Keuangan	SMA
8	Arie Setiawan	II/d	Pengelola bahan perencanaan	SMA
9	Ahmad Sutiono	II/d	Pengadministrasi Umum	SMA
10	Sri Winarti,SE	III/d	Lurah Surodakan	S1
11	Dwi Hariyani,SE	III/d	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Surodakan	S1
12	Wiwik Dwi Nurcahyani	III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan Surodakan	SMA
13	Heru Purwanto	II/d	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Surodakan	SMA
14	Susianik	II/c	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Surodakan	SMA
15	Suhardaya	II/b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Surodakan	SMP
16	Reny Widya K,S,STP,MSi.	III/d	Lurah Sumbergedong	S2
17	Agus Marchaban, SH	III/d	Sekretaris Kelurahan	S1

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
18	Sukarmadi, S.Sos	III/d	Sumbergedong Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Sumbergedong	S1
19	Sumiatiningsih	III/a	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Sumbergedong	SMA
20	Supriyono	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Sumbergedong	SMA
21	Bambang Wusprpto,SH	III/c	Lurah Ngantru	S1
22	Didik Supriyanto	III/c	Sekretaris Kelurahan Ngantru	SMA
23	Tanto Asmiardi	III/c	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Ngantru	SMA
24	Ririn Widiastuti,SE	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan Ngantru	S1
25	Rida Sulistiyani	III/b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Ngantru	S1
26	Tarmuji	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Ngantru	SMA
27	Suhendrik Wahyu Distiawan	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Ngantru	SMA
28	Wardi,SE	III/d	Lurah Tamanan	S1
29	Tutik Sri Marhandayani, S.Sos.	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kel Tamanan	S1
30	Muhammad Iqbal S, S.STP	III/b	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Tamanan	D.IV
31	Teguh Sih Budiwiyo	III/a	Pengadministrasi Kependudukan pada Kelurahan Tamanan	SMA

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
32	Pamuji Rochmad	III/d	Lurah Kelutan	SMA
33	Muasri, SE	III/d	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Kelurahan Kelutan	S1
34	Sunarto	III/b	Plt.Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Kelutan	SMA
35	Suharyono	III/b	Plt.Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan	SMA
36	Haryanto	II/d	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Kelutan	SMA

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2024

2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Trenggalek

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Trenggalek terdiri dari barang-barang yang berada di Kantor Kecamatan Trenggalek dan 5 Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 1.4
Barang yang Dikelola
Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor Kecamatan Trenggalek	1 Unit
2	Gedung Kantor dan Balai Pertemuan Kelurahan	5 Unit
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 Unit
4.	Kendaraan Dinas operasional Roda 2	33 Unit
5.	Generator Listrik/Genset	2 Unit

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
6.	Gerobak Sampah	14 Unit
7.	Meja / Kursi Kerja Staf	70 Set
8.	Meja/Kursi Kerja Eselon III dan IV	33 Buah
9.	Kursi Rapat	400 Buah
10.	Air Conditioner/ AC	16 Unit
11.	Komputer PC / Notebook	45 Unit
12.	Printer	40 Unit
13.	Jaringan Listrik	6 Unit
14.	Jaringan Telepon	6 Unit
15.	Jaringan Wif i	6 Unit
16.	LCD Proyektor	8 Unit
17.	Mesin Scanner	1 Unit
18.	Kursi Tunggu Pelayanan	11 Set
19.	Mesin Presensi Pegawai	6 Buah
20.	Filling Kabinet	15 Buah
21.	Rak Arsip / Buku	20 Buah
22.	Almari Kayu/Besi	25 Buah
23.	Alat Pemadam Kebakaran Portable (APAR)	2 Buah
24.	Televisi	7 Buah
25.	Sound System	6 Set
	Jumlah Total	1.582 unit

Sumber : Pengelola Barang Milik Daerah Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan terdiri dari Kecamatan dengan beban kerja besar dan Kecamatan dengan beban kerja kecil. Dan Kecamatan Trenggalek merupakan Kecamatan dengan beban kerja Kecil.

A. Tugas Kecamatan Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan Adapun tugas dari Kecamatan dengan beban kerja Kecil adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan/atau Bupati.

B. Fungsi Kecamatan Trenggalek

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c) Penyelenggaraan ketatausahaan;
- d) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g) Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- i) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

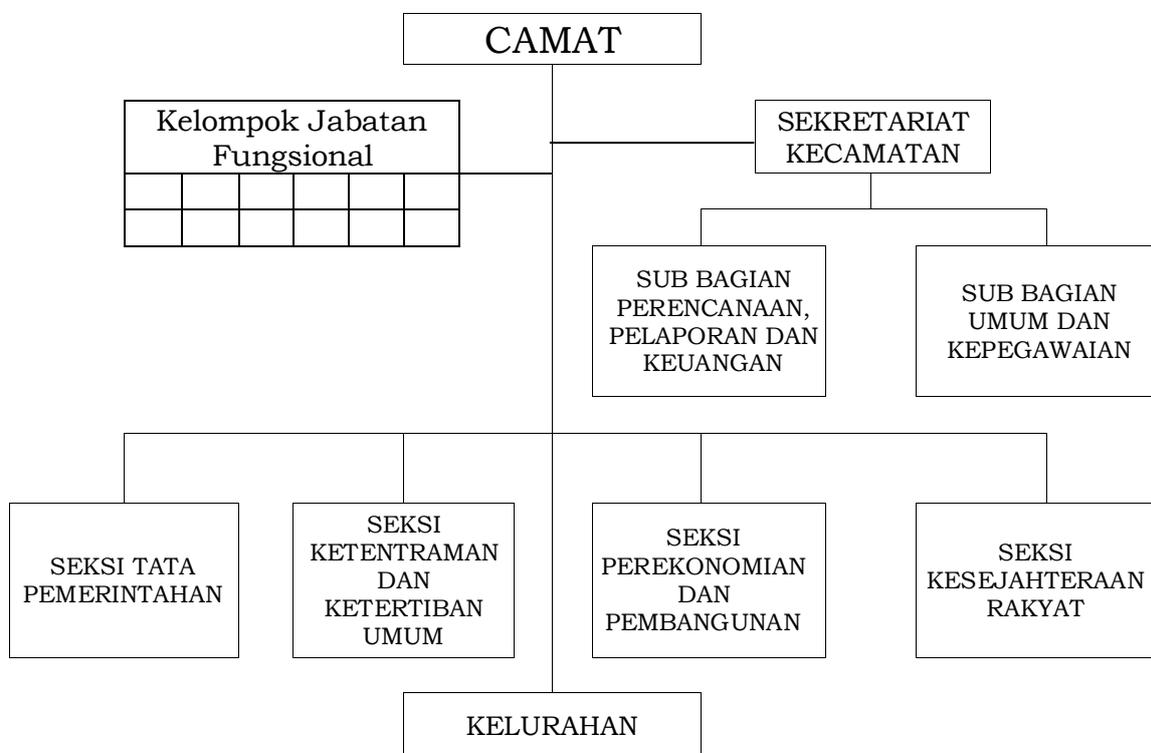
C. Struktur Organisasi Kecamatan Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya. Adapun susunan organisasi

Kecamatan Trenggalek terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Gambar 1.2
 Bagan Susunan Organisasi
 Kecamatan Trenggalek
 Berdasarkan Peraturan Bupati No.37 Tahun. 2016
 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Kecamatan

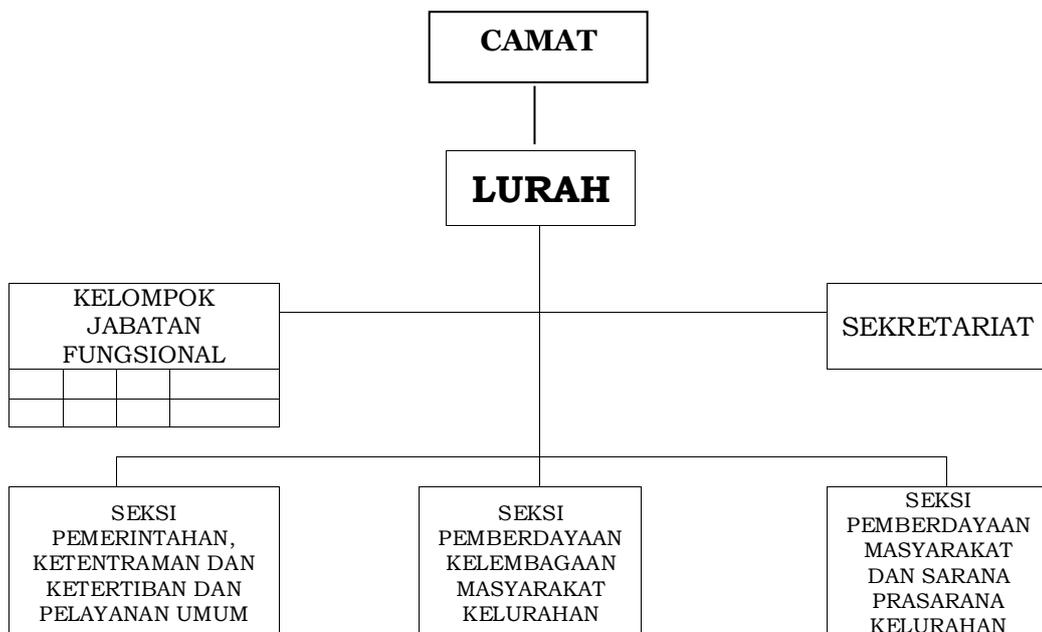


Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 5 menyebutkan bahwa :

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- (3) Kelurahan terdiri atas :
 - a. Kelurahan Tamanan;
 - b. Kelurahan Surodakan;
 - c. Kelurahan Ngantru;
 - d. Kelurahan Sumbergedong; dan
 - e. Kelurahan Kelutan.

Struktur Organisasi Kelurahan digambarkan dalam bagan susunan organisasi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Gambar 1.3
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Trenggalek
Berdasarkan Peraturan Bupati No.35 Tahun. 2017



Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kelurahan maka Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kecamatan Trenggalek, maka dirumuskan sejumlah isu strategis Kecamatan Trenggalek yaitu :

Tabel 1.5
Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Trenggalek

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	Peningkatan Koordinasi melalui Penguatan Kecamatan sebagai rumah bersama bagi tenaga pendamping/teknis/penyuluh di Kecamatan, juga untuk penguatan sistem sinergitas kecamatan dalam pemberian layanan umum	1.	Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan
2.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penanganan konflik dengan humanis yang ada di wilayah	2.	Masih tingginya angka penyakit masyarakat

Permasalahan		Isu Strategis	
3.	Penyelenggaraan Pelayanan Prima di Kecamatan dan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel	3.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan
4.	Peningkatan/ pemulihan perekonomian masyarakat melalui BUMDesa, Bumdesma dan UMKM	4.	Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah
5.	Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal	5.	Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat

1.4 LANDASAN HUKUM

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2024 berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif**
- **Daftar Isi**
- **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah
- **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.
- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran :

- a. Matriks Renstra 2021 - 2026
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Induk dan Perubahan 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Pembangunan Kabupaten Trenggalek adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TRENGGALEK YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK ”

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek (Renstra Kecamatan Trenggalek) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Perangkat Daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun

rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih telah menetapkan visinya sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjadi visi

pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU,
MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA KREATIF DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable
development)”**

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“MAJU” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“EKONOMI INKLUSIF” yakni Pembangunan Ekonomi yang menciptakan akses dan Kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Trenggalek secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek, serta mengurangi kesenjangan antar masyarakat di Trenggalek;

“SUMBERDAYA KREATIF” berarti Masyarakat Trenggalek diharapkan bias menciptakan ide - ide baru teknologi dan metode – metode baru, serta kandungan baru sehingga mengasah kesepakatan dan kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan perubahan akibat dampak ekonomi global sehingga masyarakat Trenggalek semakin Maju dalam menjalankan roda perekonomian;

“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek dalam upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
 2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat desa;
 3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, Khususnya pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big data (Satu data Besar);
 4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan;
- Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya adalah menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keempat Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kecamatan Trenggalek sebagai Perangkat Daerah di tahun 2024 adalah mendukung Misi yang Ketiga yaitu : ***“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data, Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan”***

Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Misi ke-3 (RPJMD)
 - a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data Tujuan (RPJMD);
 - b. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
 - c. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan;

2. Sasaran (RPJMD)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati, maka Camat menyelenggarakan tugas di bidang:

- a. Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan;
- c. Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat;
- d. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan;
- f. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Kesehatan;
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Trenggalek
Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2024 dan Satuan
Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Nilai RB Perangkat Daerah	83,00
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien		Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	84,50 (A)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	37 Dokumen
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kel.Surodakan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kel.Sumbergedong)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kel.Ngantru)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kel.Tamanan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kel. Kelutan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel.Surodakan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel.Sumbergedong)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel. Ngantru)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel.Tamanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel.Kelutan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Surodakan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Sumbergedong)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Ngantru)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Tamanan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel.Kelutan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Surodakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel.Sumbergedong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel.Ngantru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Tamanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel.Kelutan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Surodakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel Sumbergedong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Ngantru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Tamanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan/Material Kel.Kelutan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Surodakan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Sumbergedong	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Ngantru	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Tamanan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel.Kelutan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam 1 tahun	1 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di selesaikan	100 %
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	0 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan	100 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Surodakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Sumbergedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Tamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel.Kelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Surodakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Sumbergedong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Ngantru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Tamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.Kelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Surodakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Sumbergedong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Ngantru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Tamanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kel.Kelutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Surodakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Sumbergedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Ngantru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Tamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kel.Kelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Tujuan : Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data				Indeks Sinergitas Kecamatan	78
Sasaran : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif				Jumlah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	99
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	1 dokumen
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Dokumen
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	1 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	12 Dokumen
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Surodakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngantru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tamanan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Surodakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngantru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	14 dokumen
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Surodakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Sumbergedong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Ngantru	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Tamanan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Kelutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 dokumen
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) Indikator, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi/nilai SAKIP Perangkat Daerah.	LHE AKIP dari Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya layanan public secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99	Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan oleh PD secara online melalui tautan https://skm.trenggalekkab.go.id/login	Hasil Survey/ Kuisisioner

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 4 bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 2 bulan September Tahun 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah :

- a. Perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
- b. Adanya perubahan Perubahan prioritas atau asumsi yang berdampak signifikan pada pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	84,50 (A)
2	Meningkatnya Layanan Publik Secara Kolaboratif	2	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	99	99

Tabel 2.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.313.729.148
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	288.399.750
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.252.121.951
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	237.569.049
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	66.880.000

Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2024 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2024 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
KECAMATAN TRENGGALEK	6.029.382.198
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.608.986.448
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.269.608.548
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.186.008.548
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.307.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.847.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000
Penyediaan Bahan/Material	35.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.960.900
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.570.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.930.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.640.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000
Pemeliharaan Mebel	1.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	288.399.750
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.637.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.637.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	264.762.750
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	24.650.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	240.112.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.116.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.116.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.116.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.880.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.880.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.880.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
KELURAHAN SURODAKAN	675.863.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	131.189.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.720.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.720.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.779.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	779.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	8.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.940.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.940.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.750.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	506.515.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	506.515.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	277.815.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.700.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.159.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.159.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.159.500
KELURAHAN SUMBERGEDONG	675.863.550
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	151.660.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.760.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.760.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.071.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	691.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	9.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.880.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.110.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.380.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.730.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.719.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.569.500

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	488.772.001
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	488.772.001
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	267.593.550
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	216.178.451
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.431.049
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.431.049
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.431.049
KELURAHAN NGANTRU	675.863.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	154.568.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.760.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.760.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.632.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	9.972.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.860.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.076.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.076.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.100.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	483.136.100
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	483.136.100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.374.100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	177.762.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.159.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.159.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.159.500
KELURAHAN TAMANAN	675.863.250
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	140.523.700

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.960.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.920.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	920.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	11.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.860.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.860.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.783.700
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.763.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.020.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	497.180.050
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	497.180.050
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	283.622.250
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.557.800

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.159.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.159.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.159.500
KELURAHAN KELUTAN	675.863.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	126.801.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.960.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.718.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
Penyediaan Bahan/Material	10.038.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.721.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.721.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.401.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.360.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.041.500

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	516.402.800
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	516.402.800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	321.842.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189.560.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.659.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.659.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.659.500
JUMLAH TOTAL	9.408.699.898

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan.

III.1. Pengukuran Kinerja 2024

Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Trenggalek Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra 2021 - 2026 Kecamatan Trenggalek.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar **99,76%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	-	-	87,43	-	87,43	103,47
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99	99,83	99,66	99,86	99,85	99,81	100,81

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai di atas 100%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target dapat tercapai karena antara pimpinan dan staf bersinergi untuk mensukseskan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun kendala dan tantangan yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

- Pola Kepemimpinan yang visioner dan transformatif
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data
- Adanya Inovasi “**Angkringan Mama Syantika**” yakni Penguatan Kecamatan sebagai rumah bersama bagi tenaga pendamping/teknis/penyuluh di Kecamatan, juga untuk penguatan sistem sinergitas kecamatan dalam pemberian layanan umum.

B. Kendala atau Tantangan yang dihadapi :

- Hampir tidak di temukan kendala teknis dalam pencapaian tujuan selain banyaknya SDM/Pegawai Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga motivasi kerjanya mulai berkurang.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80 (A)	82 (A)	83 (A)	84,50 (A)	90 (AA)	90 (AA)	80,40 (A)	82,85 (A)	83,53 (A)	87,48 (A)	-	-	100,05	101,03	100,63	103,52	-	-
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	90,00	90,00	99,00	99,87	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	-	-	102,35	100,55	110,54	100,85	-	-

Pada tabel 3.2 dapat kami sajikan informasi sebagai berikut :

1. Penetapan target Tahun 2024 mengacu pada capaian kinerja Tahun 2023 (Target tidak mengacu pada dokumen perencanaan/Renstra karena pada tahun yang bersangkutan telah tercapai): dan
2. Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disesuaikan capaian kinerja Tahun 2024.

III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Kecamatan Trenggalek

Tabel 3. 2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80 (A)	82 (A)	83 (A)	84,50 (A)	90 (AA)	90 (AA)	80,40 (A)	82,85 (A)	83,53 (A)	87,48 (A)	-	-	100,05	101,03	100,63	103,52	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi dari evaluator internal sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

No.	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN	LINK TINDAK LANJUT
			TS	TB	BT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mendorong pegawai pada lingkup Kecamatan Trenggalek untuk memahami dan peduli dengan target Kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dilaksanakan Dialog Kinerja pada awal Tahun dan di gunakan sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang berisi target kinerja sesuai yang telah di sepakati dalam Dilaog Kinerja dan dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaannya tiap Triwulan.	√			Dokemntasi Dialog Kinerja dan SKP masing - masing pegawai lingkup Kecamatan Trenggalek Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1ZOeVma-lxS-unfKH-sop47AhQ_Gqmep4?usp=sharing
2	Menetapkan Definisi Operasional (DO) atas Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Trenggalek	Telah dilakukan revisi/ penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang memuat Definisi Operasional (DO) untuk setiap indikator kinerjanya.	√			Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang berisi Definisi Operasional.	https://drive.google.com/drive/folders/1mhTBkQFzDupbvUURXOTmrnMrwPrRrCR8?usp=sharing
3	Melaksanakan pengukuran Kinerja secara berjenjang	Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hasil Dialog Kinerja yang telah dilakukan	√			Hasil Dialog Kinerja dan Sasaran dan Hasil Capaian SKP tiap pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1OtyWagumrNPUIjRm3tsTUzWmJkOWv72p?usp=sharing
4	Lebih cermat dalam mendokumentasikan rapat rutin pengukuran kinerja pada lingkup Kecamatan Trenggalek, termasuk tindak lanjut atas hasil rapat terkait; dan	Telah dilakukan dokuemntasi setiap kegiatan rapat evaluasi pengukuran kinerja lingkup kecamatan dengan mengevaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.	√			Rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan tiap akhir triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1qb85_AnOuWW07sgjKvZCvHvxv-k0EV42?usp=sharing

No.	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI			KETERANGAN	LINK TINDAK LANJUT
			TS	TB	BT		
5	Lebih cermat dalam melaksanakan pendalaman atas evaluasi akuntabilitas kinerja.	Dalam setiap evaluasi rencana aksi program dan kegiatan selalu diberikan rekomendasi dan arahan pimpinan.	√			Setiap Tribulan dibuatkan Berita Acara Capaian Renaksi Program Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1YXPkQM0ayabB_nJyCdMMnzee57GI5Ri?usp=sharing

- (2) Memiliki indikator kinerja yang jelas
- (3) Memiliki disiplin kinerja yang tinggi
- (4) Komitmen Pimpinan yang Informatif dan Transformatif
- (5) Memiliki Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif
- (6) Memiliki pola komunikasi yang efektif dan efisien
- (7) Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai
- (8) Memiliki budaya kerja yang baik dan transparan

Kendala / Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Hampir tidak di temukan kendala teknis dalam pencapaian tujuan selain banyaknya SDM/Pegawai Kecamatan dan Kelurahan yang sudah mendekati masa pensiun, sehingga motivasi kerjanya mulai berkurang

III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif pada Kecamatan Trenggalek

Tabel 3. 2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	90,00	90,00	99,00	99,87	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	-	-	102,35	100,55	110,54	100,85	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam menerima pengaduan Masyarakat
- (2) Penerapan Pelayanan sesuai Standart Pelayanan (SP dan SOP)

Faktor Kendala dan Tantangan yang dihadapi adalah :

- (1) Saat ini jumlah Penduduk Kecamatan Trenggalek kurang lebih berjumlah 69.773 orang, jika di bagi dengan jumlah ASN berjumlah 36 Orang, maka setiap ASN harus melayani kurang lebih 1.938 orang, sehingga hal ini memerlukan suatu kiat – kiat khusus yang bisa menjembatani ketimpangan yang ada.

Sebagai Organisasi Perangkat daerah Kecamatan Trenggalek berusaha selalu meningkatkan Kinerja dalam hal pelayanan langsung pada Masyarakat dari yang paling bawah dengan tujuan untuk mencapai Pelayanan Prima (*Good Governance*).

Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	103, 58 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,84%	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	105%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,85 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	99,18%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	99,33%	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang

III.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Trenggalek tahun 2024 adalah sebesar **Rp.9.408.699.898,-** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp 9.134.609.820,-** atau sebesar **97,09%**. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Realisasi Anggaran Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
KECAMATAN	6.029.382.198	5.879.805.375	97,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.608.986.448	5.472.680.335	97,57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000	13.570.000	87,55
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000	5.008.500	91,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	8.561.500	85,62
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.269.608.548	5.164.982.748	98,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.186.008.548	5.083.349.248	98,02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.600.000	79.766.500	98,97
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000	995.000	99,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000	872.000	43,60
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	1.328.000	66,40
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.328.000	66,40

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000	13.084.500	76,97
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	1.650.000	82,50
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	11.434.500	76,23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.307.900	58.491.170	77,67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.847.000	1.842.500	99,76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	2.235.000	44,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	4.097.000	54,63
Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	25.473.670	72,78
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.960.900	23.858.000	95,58
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	985.000	98,50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	99.601.000	99,60
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	99.601.000	99,60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.570.000	102.947.917	97,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.930.000	21.172.138	92,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.640.000	81.775.779	98,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000	18.675.000	77,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000	7.243.000	96,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000	950.000	95,00
Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.500.000	100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	4.100.000	63,08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	2.392.000	47,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	2.490.000	99,60
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	288.399.750	281.625.700	97,65
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.637.000	23.402.000	99,01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.637.000	23.402.000	99,01
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	264.762.750	258.223.700	97,53
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	24.650.000	22.245.200	90,24
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	240.112.750	235.978.500	98,28
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.116.000	9.813.000	97,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.116.000	9.813.000	97,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.116.000	9.813.000	97,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000	50.573.140	91,95
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000	50.573.140	91,95
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	37.651.140	94,13

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	12.922.000	86,15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.880.000	65.113.200	97,36
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.880.000	65.113.200	97,36
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.000.000	33.029.700	97,15
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.880.000	32.083.500	97,58
SURODAKAN	675.863.500	660.064.563	97,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	131.189.000	124.784.258	95,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.720.000	19.460.000	89,59
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.720.000	19.460.000	89,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.779.000	12.504.100	90,75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	779.000	777.500	99,81
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	0	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.925.000	96,25
Penyediaan Bahan/Material	8.000.000	7.886.000	98,58
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	1.915.600	95,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.940.000	79.422.158	96,93
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	6.433.128	80,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.940.000	72.989.030	98,71

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.750.000	13.398.000	97,44
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.250.000	3.958.000	93,13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.500.000	9.440.000	99,37
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	506.515.000	499.213.205	98,56
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	506.515.000	499.213.205	98,56
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.966.000	99,32
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	277.815.000	276.924.840	99,68
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.700.000	217.322.365	97,15
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.159.500	36.067.100	94,52
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.159.500	36.067.100	94,52
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.159.500	36.067.100	94,52
SUMBERGEDONG	675.863.550	669.849.725	99,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	151.660.500	148.655.185	98,02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.760.000	20.760.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.760.000	20.760.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.071.000	19.632.200	97,81

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	691.000	690.500	99,93
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	968.000	96,80
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.999.800	99,99
Penyediaan Bahan/Material	9.500.000	9.203.900	96,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.880.000	6.770.000	98,40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.110.000	100.802.985	98,72
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.380.000	6.658.496	90,22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.730.000	94.144.489	99,38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.719.500	7.460.000	85,56
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.150.000	2.820.000	89,52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.569.500	4.640.000	83,31
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	488.772.001	487.736.540	99,79
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	488.772.001	487.736.540	99,79
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.681.500	93,63
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	267.593.550	267.478.400	99,96
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	216.178.451	215.576.640	99,72
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.431.049	33.458.000	94,43
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.431.049	33.458.000	94,43
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.431.049	33.458.000	94,43

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
NGANTRU	675.863.600	611.806.984	90,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	154.568.000	147.582.834	95,48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.760.000	32.760.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.760.000	32.760.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.632.000	15.910.450	90,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	782.000	97,75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	931.700	93,17
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.999.250	99,96
Penyediaan Bahan/Material	9.972.000	9.928.300	99,56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.860.000	2.269.200	58,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.076.000	88.133.384	96,77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	5.384.736	67,31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.076.000	82.748.648	99,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.100.000	10.779.000	82,28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	3.194.000	62,63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	7.585.000	94,81
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	483.136.100	429.285.650	88,85
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	483.136.100	429.285.650	88,85
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.445.000	88,90

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.374.100	298.426.000	99,35
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	177.762.000	126.414.650	71,11
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.159.500	34.938.500	91,56
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.159.500	34.938.500	91,56
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.159.500	34.938.500	91,56
TAMANAN	675.863.250	642.558.323	95,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	140.523.700	120.848.473	86,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.960.000	20.971.200	75,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000	20.971.200	75,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.920.000	15.645.900	92,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	920.000	916.000	99,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	961.200	96,12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	1.300.000	65,00
Penyediaan Bahan/Material	11.000.000	10.744.300	97,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	1.724.400	86,22
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.860.000	66.176.373	93,39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	7.856.059	71,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.860.000	58.320.314	97,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.783.700	18.055.000	72,85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.763.000	3.645.000	96,86

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.020.700	14.410.000	68,55
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	497.180.050	488.982.600	98,35
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	497.180.050	488.982.600	98,35
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.550.000	91,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	283.622.250	283.562.200	99,98
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.557.800	200.870.400	96,31
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.159.500	32.727.250	85,76
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.159.500	32.727.250	85,76
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.159.500	32.727.250	85,76
KELUTAN	675.863.800	670.524.850	99,21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	126.801.500	124.924.320	98,52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.960.000	27.960.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.960.000	27.960.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.718.200	17.591.150	99,28
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	1.175.000	99,58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	950.400	95,04
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	10.038.200	9.986.850	99,49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.478.900	99,40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.721.800	65.782.670	98,59

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	7.332.550	91,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.721.800	58.450.120	99,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.401.500	13.590.500	94,37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.360.000	7.264.000	98,70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.041.500	6.326.500	89,85
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	516.402.800	513.893.930	99,51
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	516.402.800	513.893.930	99,51
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	4.936.000	98,72
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	321.842.800	321.612.700	99,93
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189.560.000	187.345.230	98,83
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.659.500	31.706.600	97,08
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.659.500	31.706.600	97,08
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.659.500	31.706.600	97,08
JUMLAH TOTAL	9.408.699.898	9.134.609.820	97,09

Tabel 3. 6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	87,53 (A)	103,58%	6.313.729.148	6.139.475.405	97,24
2.	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	99,85	100,85%	3.094.970.750	2.995.134.415	96,77

Tabel 3. 7
Tabel Perhitungan Efisiensi Kecamatan Trenggalek Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	87,53 (A)	103,58%	6.313.729.148	6.139.475.405	97,24	1,06
2.	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	99,85	100,85%	3.094.970.750	2.995.134.415	96,77	1,04

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika = 1 maka impas
- c. Jika > 1 maka efisien

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berjalan lancar dan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mendukung pencapaian target kinerja tahun 2024, ditengah kurangnya anggaran sebagai dampak adanya kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Trenggalek melakukan langkah-langkah strategis antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam upaya pencapaian target - target kinerja dengan memanfaatkan setiap sumberdaya yang tersedia.
2. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mendapatkan Nilai 87,53 dengan predikat A, dengan begitu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100 %.
3. Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai 99,85, dengan begiatu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100%.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun - tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Perlu dilakukan penajaman analisa, meningkatkan keahlian dan profesionalisme seluruh anggota organisasi agar mampu menghadapi setiap perubahan dan pembaharuan yang muncul di lapangan, sehingga renstra tahun-tahun berikutnya akan lebih

mengenai sasaran sesuai dengan skala prioritas.

2. Peningkatan peran unsur Pengelola Kegiatan khususnya KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan supaya lebih cermat dan teliti untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
3. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah.
4. Semangat untuk mewujudkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah kuncinya ada pada kearifan ditataran pemegang kebijakan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah itu tidak melekat secara abadi pada pejabat yang ada dalam organisasi tersebut melainkan untuk mewujudkan fleksibilitas dan kredibilitas organisasi pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2024.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jln. Yos Sudarso Nomor 16 Trenggalek 6633, Telepon 0355 - 791300

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KIKI WAHYU REZEKI**

Jabatan : **CAMAT TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 04 Januari 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Bina Tingkat I
NIP. 196902251989031009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)
2	Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.930.797.700	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 197.437.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 1.000.327.300	APBD
4	Program Koordinasi Kententraman dan Keteriban Umum	Rp 258.797.500	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 52.080.000	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 9.439.439.500	

Trenggalek, 04 Januari 2024



Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jln. Yos Sudarso Nomor 16 Trenggalek 6633, Telepon 0355 - 791300

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KIKI WAHYU REZEKI**

Jabatan : **CAMAT TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 2 September 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Drs. KIKI WAHYU REZEKI
Pembina Tingkat I
NIP. 196902251989031009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)
2	Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.313.729.148	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 288.399.750	APBD
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.252.121.951	APBD
4 Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	Rp 237.569.049	APBD
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 66.880.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN	Rp 9.158.699.898	

Trenggalek, 3 September 2024


BUPATI TRENGGALEK
 selaku
 Pihak Kedua
MOCHAMAD NUR ARIFIN


CAMAT TRENGGALEK
 KABUPATEN TRENGGALEK
 selaku
 Pihak Pertama
DR. KIKI WAHYU REZEKI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196902251989031009